

Catatan Budaya

'Menghabisi' Kota Budaya

MULAI tahun ini, dan mungkin tahun yang akan datang, janganlah Anda berharap Yogya marak lagi dengan adanya Festival Kesenian. Tercatat mulai tahun 2000, Festival Teater antar Dati II, telah raib tanpa sebuah penjelasan. Begitu pula nasibnya Festival Kethoprak, juga harus berhenti. Hingga bulan ini, menurut ketua panitia, Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) masih belum jelas nasibnya. Terakhir Drs Sumaryono MA, mengungkapkan kalau Festival Sendratari 'ditiadakan' pelaksanaannya.

Persoalan dana sering dijadikan pembenaran pihak birokrasi dalam memutuskan ini, alasan yang naif. Bayangkan membiayai JEC yang butuh puluhan miliar saja bisa, padahal manfaat dan fungsinya untuk masyarakat Yogya belum jelas. Kenapa membiayai Festival, yang mungkin tidak sampai hitungan miliar, kok tidak mampu? Padahal pelaksanaan berbagai Festival merupakan agenda rutin, yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Munculnya 'kasus' di atas, semakin menguatkan sinyalemen tidak adanya keberpihakan Pemda Propinsi DIY dan Lembaga DPRD Tingkat I kepada masyarakat seni dan budaya di Yogya. Ironis sekali, bahkan sangat memalukan, hal ini jika dikaitkan dengan predikat yang disandang Yogya sebagai kota budaya.

Melihat sikap kalangan birokrat dan dewan yang demikian, selayaknya perlu direnungkan kembali akan predikat kota budaya itu. Pertanyaannya, masih layakkah Yogya menyandang sebutan Kota Budaya? Ataupun ini cara lain anggota dewan dan birokrat 'menghabisi' kota budaya yang bernama Yogyakarta?

Pertanyaan ini, tidak berlebihan jika diangkat sebagai sebuah wacana. Sebab predikat itu membawa beberapa hal yang jadi prasyarat yang jadi pendukung.

Pertama, terciptanya iklim kondusif berkesenian. Hal ini sangat perlu untuk menumbuh-kembangkan sebuah kesenian. Kondisi ini memerlukan sarana bagi kemu-

dahan seniman dalam mempresentasikan karya-karya seninya. Kondisi ini jika kita lihat realisasi yang ada, sangat jauh sekali ada di Yogya. Sebagai bukti, betapa sulitnya seniman kini akan menggelar karya.

Mereka harus berbenturan dengan perizinan, belum lagi besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa pentas di Gedung Kesenian. Untuk bisa pentas di Gedung Sosisetet Militer saja, minimal harus siap dana 1,5 juta. Itu belum biaya produksi lainnya. Kedua, terbanggunya jaringan seni yang kuat. Selain seniman juga aktif membangun sendiri, keberadaan pemerintah juga sangat besar artinya bagi seniman yang kecil.

Ketiga, adanya pembinaan yang berkelanjutan. Di sini fungsi lembaga seni-budaya dituntut untuk merangsang tumbuhnya kelompok-kelompok seni. Selama ini lembaga-lembaga yang ada belum optimal. Ada dan tidaknya lembaga seni budaya dari pemerintah, selama ini tidak dirasakan bedanya bagi seniman dan kelompok-kelompok seni selama ini.

Ketiga hal di atas paling tidak sebagai prasyarat awal, dan prasyarat lain banyak lagi. Bayangkan seandainya seniman mau pentas di Gedung Kesenian, dan pemerintah tidak memungut sewa gedung pun, sebenarnya beban biaya yang harus ditanggung pun masih banyak.

Untuk biaya latihan, untuk transportasi pemain, biaya artistik, biaya konsumsi. Dan seniman selama ini hanya mengandalkan dari donatur dan sponsor. Wajar saja keadaan di atas itu kini seolah menjadi momok bagi banyak seniman. Mereka harus berpikir seribu kali sebelum memutuskan untuk pentas atau tidak.

Kondisi semacam di atas, jika terjadi pada sebuah kota yang tidak punya embel-embel kota budaya, mungkin sangat bisa dimaklumi. Tapi ini terjadi bagi seniman yang hidup di sebuah kota dengan predikat kota budaya. □-k

*) **Eko Nuryono,**

Sanggar Studi Jawa Yogyakarta.